

## Analisis Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Kepolisian (Studi kasus: Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Medan)

Franklin Asido Rossevelt<sup>\*1</sup>, Dara Aisyah<sup>2</sup>, Salsa Rachelia Butar-Butar<sup>3</sup>, Wulan Ananda Melri<sup>4</sup>, Sastri Dea Keren Ginting<sup>5</sup>, Mariana Juni Arta Sinaga<sup>6</sup>, Alya Azwa Purba<sup>7</sup>, Ella Winta Manik's<sup>8</sup>, Aldy Wiganda<sup>9</sup>, Rizky Pangihutan Sijabat<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Medan, 20222, Indonesia

\*Corresponding Author: [franklin@usu.ac.id](mailto:franklin@usu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 7 December 2024

Revised 13 December 2024

Accepted 27 December 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/>

E-ISSN:

DOI:

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of the level of public trust on police performance in handling cases of motor vehicle theft (curanmor) in Medan City. Public trust is measured using five variables adapted from Kim (2005) in Dwiyanto (2011), namely credible commitment, sincerity, honesty, competence and justice. Meanwhile, police performance is measured using indicators proposed by Robbins (2006), which include quality, quantity, timeliness, effectiveness and independence. The data analysis technique that the author uses in this research is quantitative descriptive. The data collection used was a questionnaire given to 154 respondents in Medan City, using data processing techniques through coding to analyze the relationship between the level of public trust and police performance. It is hoped that the results of this research will provide deeper insight into the important role of public trust in supporting improved police performance, especially in handling theft cases.*

**Keyword:** Public trust, police performance, curanmor

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja polisi dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Medan. Kepercayaan publik diukur menggunakan lima variabel yang diadaptasi dari Kim (2005) dalam Dwiyanto (2011), yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Sementara itu, kinerja polisi diukur menggunakan indikator yang diusulkan oleh Robbins (2006), yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 154 responden di Kota Medan, dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui pengkodean untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepercayaan publik dan kinerja polisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya peran kepercayaan publik dalam mendukung peningkatan kinerja kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus curanmor.

**Kata Kunci:** Kepercayaan Publik, Kinerja Polisi, Curanmor



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

## **1. Pendahuluan**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait dengan kinerja dan persepsi masyarakat terhadap integritas serta profesionalismenya. Terkait hal tersebut, salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja kepolisian adalah dengan mengukur kepuasan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap polisi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendukung atau menghambat keberhasilan polisi dalam menangani berbagai kasus, termasuk dalam hal penanggulangan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Kasus ini menjadi isu penting di berbagai kota besar, termasuk Kota Medan, yang mana angka kejadiannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menuntut kinerja polisi untuk lebih optimal dalam memberantas tindak kriminal tersebut.

Konsep kepercayaan publik itu sendiri telah banyak dibahas dalam teori-teori sosial, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Kim (2005) dalam (Dwiyanto, 2011:368), yang menyatakan bahwa kepercayaan publik merupakan sikap yang muncul berdasarkan evaluasi individu atau kelompok terhadap kinerja suatu institusi publik. Evaluasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat dari pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu tolok ukur utama dalam membangun atau meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Di sisi lain, teori kinerja yang dikemukakan oleh Robbins (2006) menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam organisasi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam konteks kepolisian, kinerja tidak hanya dilihat dari sejauh mana polisi mampu mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga dari bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, memberikan pelayanan yang adil, serta membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai elemen masyarakat.

Di sisi lain, kinerja polisi dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor juga tidak hanya diukur dari hasil akhir, seperti jumlah kendaraan yang berhasil ditemukan atau pelaku yang tertangkap. Namun, kinerja juga harus dilihat dari kualitas proses, termasuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, akuntabilitas dalam penanganan kasus, serta penerapan prinsip keadilan dalam setiap tindakan polisi. Kinerja yang baik tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga meningkatkan rasa puas dan percaya masyarakat terhadap kepolisian. Pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat kota ini

memiliki tingkat kriminalitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencurian kendaraan bermotor di Medan menunjukkan angka yang signifikan, yang mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dimana dalam data PUSIKNAS BARESKIM POLRI menyebutkan bahwa terdapat data 25.350 kasus sepanjang Januari-Juni 2024, yang di dalamnya termasuk kasus curanmor roda dua yaitu 9.231 kasus. Hal ini menuntut kepolisian untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam strategi penanggulangan kejahatan, termasuk melalui peningkatan kualitas layanan dan transparansi dalam penanganan kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan. Dengan mengacu pada teori kepercayaan publik dari Kim (2005) dalam (Dwiyanto, 2011:368), dan teori kinerja dari Robbins (2006), penelitian ini akan menggali bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi dapat mempengaruhi hasil kerja kepolisian, serta bagaimana kinerja polisi dalam menangani kasus curanmor dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas penanganan kasus kejahatan. Pentingnya penelitian ini terletak pada fakta bahwa pencurian kendaraan bermotor bukan hanya sekadar masalah kriminalitas, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana kepolisian dapat memenuhi harapan masyarakat akan rasa aman. Oleh karena itu, pengukuran kinerja polisi dalam menangani kasus curanmor harus dilihat secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi, termasuk kecepatan respon, ketepatan penanganan, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sehingga, penelitian ini menjadi sangat relevan, mengingat pentingnya peran kepercayaan publik dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian. Dengan mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kinerja kepolisian, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang lebih strategis dan efektif dalam memerangi kejahatan di Kota Medan, khususnya dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang menjadi masalah serius di wilayah ini.

## **2. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018:15) bahwa metode kuantitatif memanfaatkan data berbentuk angka yang dianalisis secara statistik. Siregar (2016:107) menambahkan bahwa pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek berdasarkan fakta aktual yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Data penelitian dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder (Sugiyono, 2018:213). Sumber primer berupa data langsung dari kuesioner yang disebarkan kepada 154 responden yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait kinerja kepolisian dalam penanganan

kasus curanmor. Sumber sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, artikel, data internet, skripsi, dan tesis. Populasi penelitian mencakup individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang kinerja kepolisian dalam kasus curanmor, sesuai definisi populasi menurut Sugiyono (2006:73). Sampel penelitian terdiri dari 154 responden yang dipilih secara acak menggunakan teknik sampling representatif (Sugiyono, 2018:131).

Analisis data dilakukan menggunakan beberapa metode. Pertama, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, opini, dan persepsi responden (Siregar, 2016:138). Kedua, uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson untuk memastikan instrumen dapat mengukur secara tepat. Instrumen dianggap valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dan tidak valid jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (Siregar, 2016:162). Terakhir, uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Alpha Cronbach untuk mengevaluasi konsistensi internal instrumen. Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih dari 0.7 (Muhidin & Abdurahman, 2017:37).

### 3. Hasil & Pembahasan

Kim dalam (Dwiyanto, 2011:368) menyimpulkan bahwa kepercayaan publik setidaknya dapat diukur dari lima variabel, yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

#### a. Komitmen yang Kredibel (*Credible Commitment*)

Para ilmuwan politik dan administrasi publik telah lama menggunakan variable ini untuk menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Variable tersebut termasuk yang paling sering digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik. Kim (2005), Fukuyama (1995), Kass (1990), dan La Porte & Metlay (1996) dalam (Dwiyanto 2011:369) dalam penelitiannya menggunakan pengetahuan dan persepsi warga mengenai kepedulian pemerintah dan pejabatnya terhadap kepentingan warga sebagai indikator kepercayaan publik.

#### b. Baik Hati (*Benevolence*)

Keyakinan warga bahwa pemerintah dan para pejabatnya memiliki niat baik dan kepedulian yang tulus (*genuine*) terhadap kepentingan warga sering menjadi penjelasan alasan warga memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Beberapa penulis sebelumnya telah menjadikan variabel ini sebagai variabel yang penting untuk menjelaskan kepercayaan publik (Berman, 1997; Braitwaite, 1998, Montgomery, Jordens & Little, 2008) dalam (Dwiyanto, 2011:370). Pemerintah dan pejabatnya dinilai memiliki ketulusan yang tinggi dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak akan mengambil manfaat dari ketidakberdayaan warga.

#### c. Kejujuran (*Honesty*)

Pentingnya kejujuran sebagai variable yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik juga telah banyak dikutip oleh para peneliti. Berman (1997) dan Nye (1997) dalam (Dwiyanto 2011:371) menggunakan kejujuran sebagai variable yang penting untuk menjelaskan perubahan kepercayaan publik. Ketika warga menilai pemerintah dan para pejabatnya tidak jujur, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Persepsi tentang kejujuran pemerintah dan para pejabatnya dapat terbentuk dari penilaian terhadap perilaku para pejabat publik ketika menyelenggarakan pelayanan publik atau dari berbagai sumber informasi termasuk dari media yang memberitakan perilaku para pejabat dalam menjalankan kekuasaan dan mandat dari rakyat.

d. Kompetensi

Kepercayaan publik selalu menggambarkan penilaian warga tentang kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah dan pejabatnya dalam menjalankan tugasnya. Warga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada umumnya adalah warga yang menilai institusi pemerintah dan para pejabat publik memahami masalah yang dihadapi warga dan mampu melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penilaian warga tentang kompetensi institusi pemerintah dan para pejabat publik sering bersifat subjektif, karena tergantung pada harapan mereka terhadap kapasitas pemerintah.

e. Keadilan (*Fairness*)

Faktor lainnya yang sering memengaruhi kepercayaan publik adalah keadilan. Keadilan dinilai dari tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik pada saat melayani warga, yaitu apakah melayani secara adil berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh akal sehat masyarakat atau menggunakan logikanya sendiri. Jika prinsip dan nilai keadilan yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan atau dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat diterima oleh akal sehat masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pejabatnya cenderung dinilai adil oleh warga dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, terlebih dahulu mengetahui bagaimana kinerja polisi yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Kinerja dapat dilihat melalui indikator dari Robbins (2006) yang mengemukakan Indikator kinerja menggambarkan beberapa aspek kinerja yang sangat kritis dari sebuah perusahaan atau organisasi yang akan menentukan sukses tidaknya perusahaan atau organisasi tersebut pada masa kini maupun masa depan. Dalam mengembangkan indikator kinerja karyawan secara individu ada 5 Indikator, yaitu:

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain
4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi komitmen kerjanya. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

### 3.1 Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dari 154 responden dilakukan rata-rata dengan skor total responden adalah 44.03 dengan skor minimum 15 dan maksimum 75. Nilai ini menunjukkan persepsi publik yang cukup positif terhadap kinerja kepolisian, meskipun terdapat variasi yang signifikan antarresponden, variasi ini dapat mencerminkan heterogenitas pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan kepolisian.

### 3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel yang dikaji. Uji validitas dilakukan menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment* yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara setiap item dalam kuesioner dengan total skor. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item memiliki korelasi diatas 0,30, yang merupakan batas minimal untuk menentukan validitas suatu item. Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Table 3.1 Uji Validitas Variabel X

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
<i>Komitmen Yang Kredibel</i>			
1	0.774	0.133	Valid
2	0.855	0.133	Valid
<i>Ketulusan</i>			
1	0.897	0.133	Valid
2	0.873	0.133	Valid
<i>Kejujuran</i>			
1	0.874	0.133	Valid
2	0.799	0.133	Valid
<i>Kompetensi</i>			

1	0.878	0.133	Valid
<i>Keadilan</i>			
1	0.818	0.133	Valid

Table 3.2 Uji Validitas Variabel Y

Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
<i>Kualitas</i>			
1	0.862	0.133	Valid
<i>Kuantitas</i>			
1	0.873	0.133	Valid
2	0.775	0.133	Valid
<i>Ketepatan Waktu</i>			
1	0.839	0.133	Valid
2	0.882	0.133	Valid
<i>Efektivitas</i>			
1	0.868	0.133	Valid
<i>Keadilan</i>			
1	0.769	0.133	Valid

Dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel kepercayaan publik (variabel X) dan kinerja kepolisian (variabel Y) dinyatakan valid.

Pada uji reliabilitas, nilai *Alpha Cronbach* untuk variabel X dan variabel Y masing-masing menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0.7, yang menandakan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Nilai *Alpha Cronbach* yang dihitung dari data adalah:

Table 3.3 Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Alpha Cronbach</i>	Reliabilitas
X	8	0.941	Reliabel
Y	7	0.9.29	Reliabel

Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dapat dipercaya untuk mengukur hubungan antara tingkat kepercayaan publik dan kinerja kepolisian terkait penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

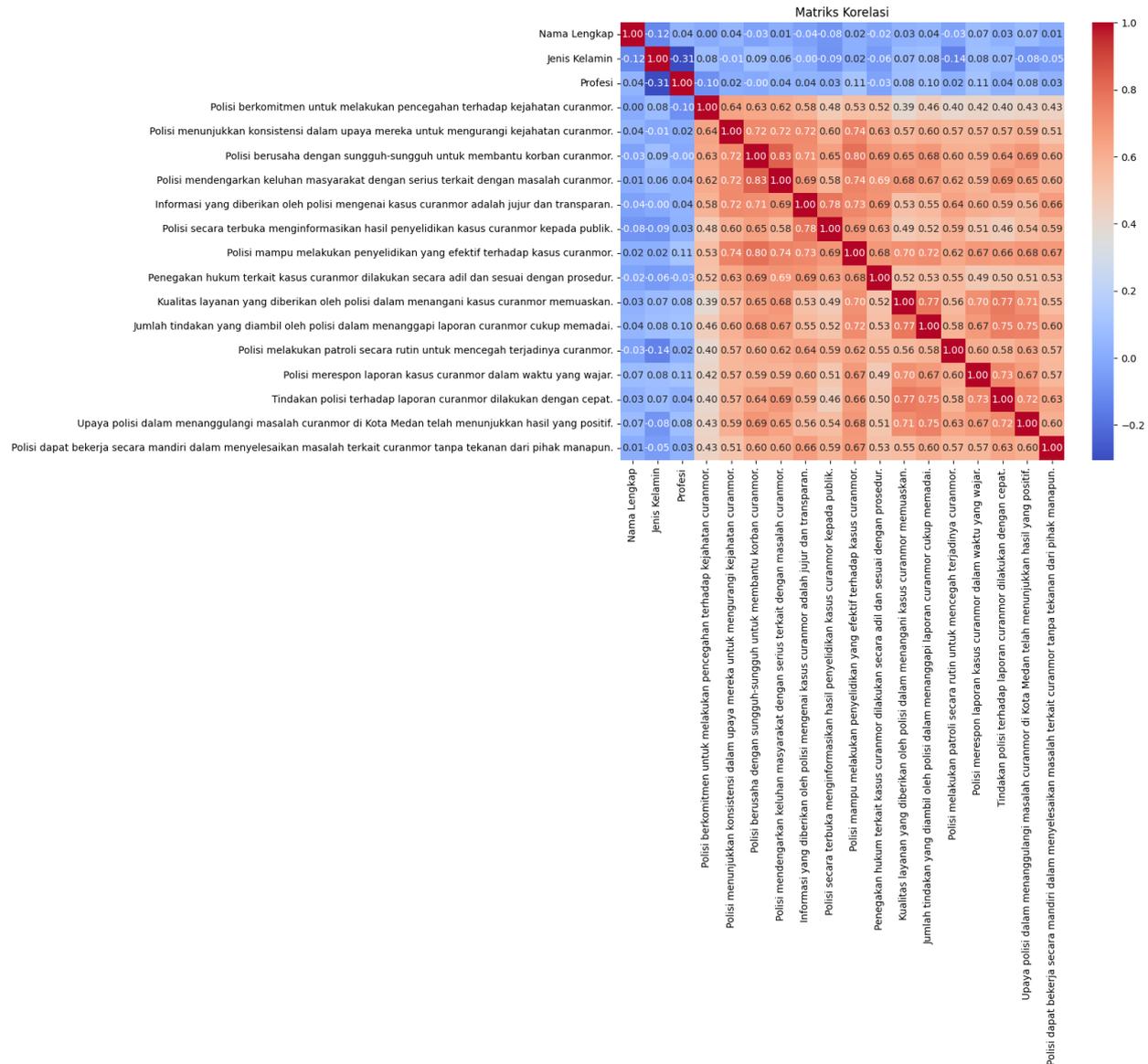
### 3.3 Hubungan Antara Variabel X dan Y

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara skor total variabel X dan variabel Y, dengan nilai korelasi ( $r$ ) sebesar 0.8113 dan  $p$ -value sebesar  $2.92 \times 10^{-37}$ . Korelasi ini menunjukkan bahwa:

Table 4.3 Uji Korelasi

Hasil Uji Korelasi	Nilai
Nilai Korelasi ( $r$ )	0.8113
Nilai $p$ -value	$2.92 \times 10^{-37}$
Interpretasi Signifikan	Signifikan

Gambar 3.1 Matriks korelasi



- Arah Hubungan: Hubungan antara kedua variabel bersifat positif, yang berarti peningkatan skor pada tingkat kepercayaan publik (variabel X) diikuti dengan peningkatan skor pada kinerja kepolisian dalam menangani kasus curanmor (variabel Y).
- Kekuatan Hubungan: Dengan nilai korelasi sebesar 0.8113, hubungan antara kedua variabel tergolong sangat kuat menurut interpretasi korelasi Pearson
- Signifikansi Statistik: P-value yang sangat kecil ( $< 0.05$ ) mengindikasikan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik, sehingga hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.

### 3.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepercayaan publik Kim (2005), yang menyatakan bahwa kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat terhadap kejujuran, kemampuan, dan

tanggung jawab suatu institusi. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepolisian di Kota Medan dalam penelitian ini meningkatkan persepsi masyarakat tentang seberapa baik kepolisian menangani kasus curanmor. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori kinerja Robbins (2006). Teori ini menjelaskan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan persyaratan tertentu. Peningkatan kepercayaan publik mendorong persepsi yang lebih baik tentang kepolisian.

Selain mendukung teori kepercayaan publik dari Kim (2005) dan teori kinerja Robbins (2006), hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan positif antara tingkat kepercayaan publik dan kinerja kepolisian mencerminkan pentingnya persepsi masyarakat dalam membentuk citra institusi kepolisian. Ketika masyarakat merasa kepolisian mampu memberikan pelayanan yang transparan, adil, dan efektif, hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat legitimasi kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa indikator kepercayaan publik seperti kejujuran, kompetensi, dan keadilan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Misalnya, penilaian masyarakat terhadap kemampuan kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan dan mengembalikan kendaraan yang hilang menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, aspek-aspek seperti keterbukaan informasi kepada masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penanganan kasus juga memberikan dampak besar terhadap persepsi publik.

Dari perspektif praktis, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan publik tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja kepolisian, tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian dalam menangani kejahatan. Dukungan masyarakat yang tinggi dapat mempercepat proses pelaporan kasus dan mempermudah pengungkapan kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor.

### 3.5 *Tantangan dalam Penelitian*

Penelitian ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data yang terkumpul. Meskipun responden dipilih secara acak untuk mewakili masyarakat Kota Medan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan kelompok tertentu yang sulit dijangkau sehingga suara mereka kurang terwakili dalam hasil penelitian. Selain itu, terdapat potensi bias responden. Beberapa responden mungkin memberikan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi yang sangat terbatas atau dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap pemberitaan media tentang kepolisian. Hal ini bisa menyebabkan hasil yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan.

Kendala lain yang dihadapi adalah tantangan metodologi. Penggunaan pendekatan kuantitatif, meskipun memberikan gambaran yang luas, sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas pengalaman masyarakat dalam interaksi dengan polisi. Beberapa aspek, seperti kualitas komunikasi antara polisi dan masyarakat, mungkin membutuhkan pendekatan kualitatif untuk diungkap lebih dalam. Terakhir, penelitian ini juga menghadapi kendala logistik dalam pengumpulan data. Proses distribusi kuesioner yang merata di berbagai wilayah Kota Medan membutuhkan koordinasi yang baik untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini meliputi penyempurnaan desain kuesioner untuk mengurangi potensi bias, serta pemilihan metode sampling yang diharapkan dapat menggambarkan populasi secara umum. Untuk penelitian mendatang, disarankan mengadopsi pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

## **4. Kesimpulan dan Saran**

### *4.1 Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja polisi, ditemukan bahwa terdapat bukti empiris bahwa indikator kepercayaan publik seperti kejujuran, kompetensi, dan keadilan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Dalam uji korelasi ( $r$ ) ditemukan bahwa hubungan kedua variabel bersifat positif, yang berarti peningkatan skor pada tingkat kepercayaan publik (variabel X) dipengaruhi oleh peningkatan skor pada kinerja kepolisian dalam menangani kasus curanmor (variabel Y).

### *4.2 Saran*

Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap penanganan kasus curanmor dan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kepolisian juga dapat membentuk jaringan komunikasi dengan masyarakat melalui forum diskusi, media sosial, atau pertemuan langsung untuk dapat mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat, hal ini juga dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

## **5. Daftar Pustaka**

Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.

Hadi, R., & Purnama, Y. (2022). Evaluasi kinerja kepolisian di era digital: Menghadapi tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi dan Kepolisian*, 6(4), 76- 89

- Haryanto, A., & Andriani, T. (2020). Kepercayaan publik terhadap polisi dan dampaknya terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan. *Jurnal Studi Kepolisian*, 13(2), 99-112.
- Kim, S. (2005). Public trust in government: A multidimensional perspective. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(4), 671-693.
- Omar, M. M., & Syamsuddin, M. (2019). Persepsi masyarakat terhadap integritas polisi dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(2), 45-58.
- PUSIKNAS BARESKIM POLRI. (2024). Laporan data pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sepanjang Januari-Juni 2024. Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri.
- Saputro, A. (2020). Kinerja kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan di kota besar. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 145-160.
- Suharsono, D. (2018). Peningkatan kinerja kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal Polisi dan Masyarakat*, 7(1), 50-67.
- Sulaiman, M. (2023). Strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan di area perkotaan: Studi kasus di Medan. *Jurnal Kepolisian Perkotaan*, 14(2), 142-158.
- Teguh, R. (2017). Pengaruh kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi dalam penanganan kasus curanmor. *Jurnal Kepolisian Indonesia*, 8(1), 22-34.
- Yusuf, H. (2021). Pengaruh faktor eksternal terhadap kinerja polisi dalam penanganan kejahatan di perkotaan. *Jurnal Hukum dan Kriminal*, 5(2), 102- 118.